



Judul : Kisruh DPR dan Menteri BUMN
Tanggal : Senin, 03 Juli 2017
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 6

Kisruh DPR dan Menteri BUMN

28 Agustus 2015

Bareskrim Polri menggeledah kantor PT Pelindo II terkait dengan dugaan korupsi pengadaan 10 unit *mobile crane*.

11 September 2015

- Komisi VI DPR menyarankan Menteri BUMN Rini Soemarno memecat Dirut PT Pelindo II RJ Lino.
- Menteri Rini menyatakan tak mau buru-buru memecat bos Pelindo itu.

5 Oktober 2015

DPR mengesahkan pembentukan Pansus Pelindo II untuk mengevaluasi kasus yang terjadi di Pelindo II.

18 Desember 2015

KPK menetapkan RJ Lino terkait dengan dugaan korupsi pengadaan 3 unit *quay container crane*.

Fungsi Pengawasan DPR

- Tugas komisi di bidang pengawasan meliputi:
- Pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya.
- Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya.
- Memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya.
- Pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah.
- Membahas dan menindaklanjuti usulan DPD.

Berdasarkan UU MD3, pansus berwenang memanggil siapa pun, dari warga negara biasa, badan hukum, pejabat pemerintah, hingga pejabat negara, dan bisa memanggil paksa pihak-pihak yang menolak pemanggilan tanpa alasan yang jelas.

23 Desember 2015

- Pansus Pelindo II menyerahkan rekomendasi ke Sidang Paripurna DPR. Salah satunya meminta Presiden Jokowi memberhentikan Rini dari jabatan Menteri BUMN.
- Plt Ketua DPR saat itu Fadli Zon diminta oleh Pansus Pelindo II untuk melarang Rini hadir ke DPR.

16 Juni 2016

Presiden Jokowi menunjuk Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menggantikan Menteri Rini untuk menggelar rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI membahas perubahan APBN 2016 dan pembahasan RKA K/L 2017 untuk Kementerian BUMN.

23 Maret 2017

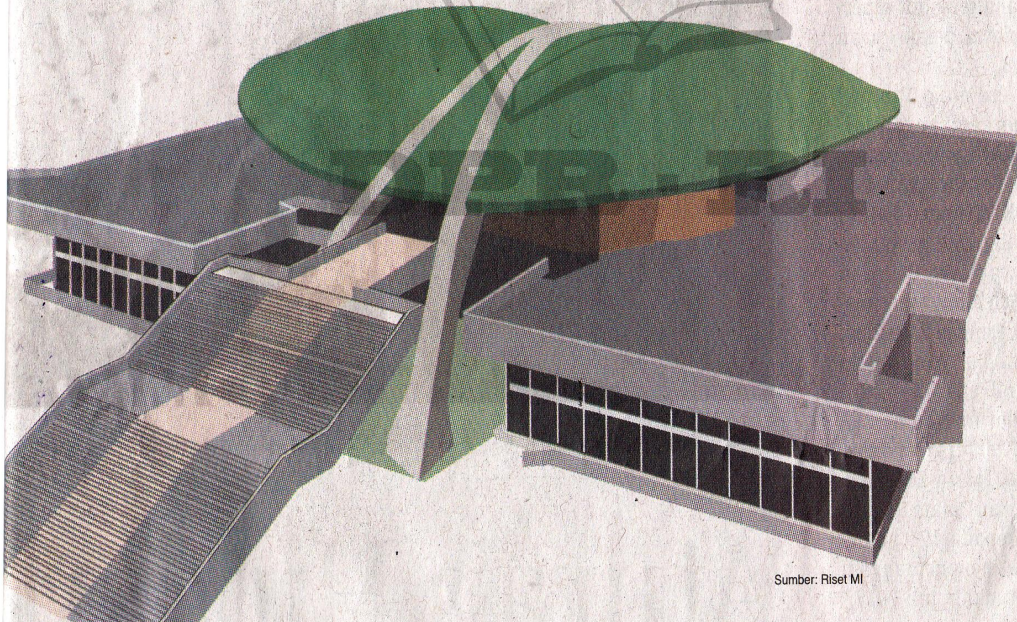
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendatangi Komisi VI DPR untuk menggantikan Menteri BUMN Rini Soemarno yang masih dilarang menyambangi DPR.

25 Juni 2017

Menteri Rini mengatakan dirinya ingin memperbaiki komunikasi dengan Komisi VI DPR.

1 Juli 2017

Ketua MKD DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan bakal berkoordinasi dengan anggota Komisi VI DPR lantaran komisi tersebut sudah 2 tahun tidak menggelar rapat kerja dengan Menteri Rini Soemarno.



Sumber: Riset MI